



RENCANA KERJA PERANGAT DAERAH

KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Darah Tahun Lalu	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.3. Prestasi Yang Dicapai Pada Tahun 2023.....	46
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	48
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	64
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Kesesuaian Program Nasional dan Program Provinsi	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	69
3.3. Program dan Kegiatan	70
3.4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan.....	74

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	85
--	----

BAB V PENUTUP	105
---------------------	-----

TABEL-TABEL :

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Singorojo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Singorojo s/d Tahun 2023.....	28
2. Tabel T- C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Singorojo.....	45
3. Tabel T – C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	49
4. Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kendal	64
5. Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Singorojo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	75

Lampiran-lampiran :

- SK Bupati Kendal Nomor 050/24/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut diatas Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singorojo Tahun 2021 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo Tahun 2025.

Kendal, Agustus 2024.


CAMAT SINGOROJO

CANDRA PUTRA, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2025. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 adalah **“Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian”**. Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Rencana Kerja Kecamatan Singorojo tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mengacu pada *renstra* Kecamatan Singorojo tahun 2021-2026. Adapun Kecamatan Singorojo melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2021-2025 yang ke 5 yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi , dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan ”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan;
- e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

B. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu :

Kajian terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (n-1) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan output sub kegiatan tahun 2023, serta faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut ;Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut; Prestasi yang dicapai pada tahun 2023; Isu-isu penting/strategis dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan

antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah:

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daaerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3. Program dan kegiatan berupa penjelasan mengenai:

- Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik mengenai jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

D. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah;

E. Penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Singorojo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Singorojo selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Singorojo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.135.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 71 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah tersusunnya
keluaran dokumen perencanaan
3. Target capaian kegiatan : 7 dokumen
4. Realisasi capaian : 7 dokumen
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

Dengan realisasi anggaran yang 71 % dokumen perencanaan yang dibutuhkan sudah semuanya tersusun .

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.757.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.183.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 67,28%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan capaian
keluaran kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
3. Target capaian kegiatan : 4 laporan
4. Realisasi capaian : 4 laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

Dengan realisasi anggaran 67,28 % dokumen realisasi kinerja seperti LKJiP, LKPD, Laporan SKM dan laporan realisasi anggaran sudah tersusun.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.987.142.578,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.800.247.273,-
Realisasi Anggaran (%) : 91%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN dalam satu tahun sebanyak 16 orang
3. Target capaian kegiatan : 16 orang
4. Realisasi capaian kegiatan : 16 orang
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100 % , namun realisasi anggaran 91 % disebabkan karena adanya ASN yang pensiun, kekosongan pejabat struktural dan mutasi ASN.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator Kinerja Antara Lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 86.769.600,-
Realisasi Anggaran : Rp. 86.719.200,-

- Realisasi Anggaran (%) : 98%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran terbayarnya honor
pengelola pengadaan
barang/jasa dan
penatausahaan
keuangan
3. Target capaian kegiatan : 12 bulan
4. Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

Capaian kinerja dan realisasi keuangan sudah sesuai karena honor yang dibayarkan sesuai dengan yang dianggarkan.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 (enam) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.790.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.790.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah alat listrik yang
keluaran tersedia
3. Target capaian kegiatan : 35 buah
4. Realisasi capaian : 35 buah
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Kebutuhan alat listrik selama satu tahun sudah sesuai dengan yang dianggarkan, hal tersebut didukung dengan efisiensi penggunaan lampu, pada siang hari lampu dimatikan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 26.452.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,78%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Penyediaan kebutuhan filling kabinet, almari, mesin potong rumput untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 32.544.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 32.544.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Bahan
keluaran Logistik Kantor
yang Disediakan

3. Target capaian kegiatan : 614 paket
4. Realisasi capaian : 614 paket kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Diperlukan Rapat Koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan diluar yang dilaksanakan program prioritas, dengan penyediaan makan minum rapat penyediaan bahan logistik kantor.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Pagu Anggaran : Rp.8.496.600,-

Realisasi Anggaran : Rp.7.320.500,-

Realisasi Anggaran (%) : 86%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Barang keluaran Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 120 Paket
4. Realisasi capaian : 106 Paket kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100 %
(%)

Paket barang cetakan dan penggandaan stop map, amplop dan fotocopi sudah terpenuhi dengan realisasi anggaran sebesar 86 %.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Pagu Anggaran : Rp. 73.731.340,-

Realisasi Anggaran : Rp 63.388.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 86%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

SPPD luar daerah tidak terserap 100 % disebabkan adanya reefisiensi anggaran yang tidak diperbolehkannya melaksanakan rapat diluar daerah.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.080.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 24.060.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 92,25%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Peralatan
keluaran dan Mesin

Lainnya yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 6 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 6 unit
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sudah dipenuhi .

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
3. Target capaian kegiatan : 200 buah
4. Realisasi capaian : 200 buah
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Kebutuhan materai untuk pembuatan SPJ selama satu tahun sudah dipenuhi .

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Pagu Anggaran : Rp. 35.432.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 29.094.007,-
Realisasi Anggaran (%) : 82,11%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pembayaran rekening listrik , telepon dan wifi sesuai dengan tagihan rekening untuk kebutuhan dalam satu tahun.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 83.424.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 83.364.108,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,93%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 Laporan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pembayaran honor bagi tenaga TPK sudah dilaksanakan 12 bulan sesuai dengan SBU Kabupaten Kendal ,honor TPK Kecamatan Singorojo sebanyak 3 orang.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1. Pagu Anggaran : Rp. 39.162.744,-
Realisasi Anggaran : Rp. 32.914.500,-

Realisasi Anggaran (%) : 84%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Kendaraan Dinas
keluaran Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara
dan Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
3. Target capaian kegiatan : 17 Unit
4. Realisasi capaian : 17 Unit
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 17 unit sudah dilaksanakan sesuai waktu perpanjangan masing-masing kendaraan dinas dan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 28.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 27.693.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Gedung Kantor
keluaran dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direha-
bilitasi
3. Target capaian kegiatan : 3 Unit
4. Realisasi capaian : 3 Unit
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pemeliharaan kantor dinas untuk pembuatan talang air apabila

musim hujan agar air hujan tidak mengalir kemana-mana, untuk pembuatan kamar mandi rumah dinas, perbaikan jendela ruang camat serta pengecatan gedung kantor sekretariat dan ruang pelayanan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 4.880.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.740.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Sarana dan
keluaran Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
3. Target capaian kegiatan : 3 unit
4. Realisasi capaian : 3 unit
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Servise AC harus dilakukan secara berkala setiap tahunnya, ada juga yang perlu diperbaiki.

d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.830.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.204.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 92%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Peralatan dan
keluaran Mesin Lainnya yang
Dipelihara

3. Target capaian kegiatan : 4 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 4 unit
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pemeliharaan komputer dan printer selama 1 tahun telah dilaksanakan termasuk penggantian keyboard laptop dan komputer, serta servis printer

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.660.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 97,39%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Target capaian kegiatan : 1 kegiatan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Sosialisasi pengajuan ijin usaha telah dilaksanakan dengan mengundang 52 orang dari unsur desa dan UMKM, dan peserta yang hadir 52 orang.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan 2 (dua) sub kegiatan dan **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** dengan 2 (dua) sub kegiatan :

I. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan

indikator kinerja antara lain :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.548.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 12.536.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Lembaga
keluaran Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Musrenbangcam sudah dilaksanakan dengan mengundang semua unsur dalam Musrenbangcam sebanyak 100 orang, dan peserta yang hadir sebanyak 100 orang.

- b. **Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan**, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 22.688.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 22.638.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 100%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

3. Target capaian kegiatan : 11 laporan

4. Realisasi capaian : 11 laporan
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Kegiatan Pleno dan Raker PKK sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan program kerja yang telah disusun oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Singorojo.

II. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan indikator kinerja antara lain :

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan , dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.000.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 12.675.600,-

Realisasi Anggaran (%) : 98%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Lembaga
keluaran Kemasyarakatan yang
Ditingkatkan Kapasitasnya

3. Target capaian kegiatan : 4 Lembaga Kemasyarakatan

4. Realisasi capaian : 4 Lembaga Kemasyarakatan
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan telah dilaksanakan dengan mengundang 4 lembaga kemasyarakatan dari desa sebanyak 52 orang, agar lembaga yang ada di desa semakin memahami peran dan partisipasi aktif untuk pembangunan desa.

b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat,
dengan indikator kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 17.400.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 17.285.000,-

Realisasi Anggaran (%) : 99,34%

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Fasilitasi
keluaran Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat

3. Target capaian kegiatan : 2 laporan

4. Realisasi capaian : 2 laporan
kegiatan

5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Dalam rangka memfasilitasi UMKM yang ada di wilayah kecamatan Singorojo untuk meningkatkan mutu hasil produk, dilaksanakan pelatihan cara pengemasan produk agar lebih menarik dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan mengundang pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Singorojo sebanyak 52 orang.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,** dengan sub kegiatan

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 76.168.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 76.114.008,-
 Realisasi Anggaran (%) : 99,93%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
 keluaran Koordinasi/Sinergi dengan
 Perangkat Daerah yang
 Tugas dan Fungsinya di
 Bidang Penegakan
 Peraturan Perundang-
 Undangan dan/atau
 Kepolisian Negara
 Republik Indonesia
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
 (%)

Honor Linmas sebanyak 3 orang selama 12 bulan sudah dibayarkan sesuai Standar Biaya Umum Kabupaten Kendal.

2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan,** dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.776.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 12.095.000,-

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Realisasi Anggaran (%) | : | 98,53% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| 3. Target capaian kegiatan | : | 4 laporan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : | 4 laporan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : | 100% |

Rapat koordinasi Forkompincam dilaksanakan tiap 3 bulan sekali .

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan 1 (satu) sub kegiatan :

1. Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Pagu Anggaran | : | Rp. 16.050.000,- |
| Realisasi Anggaran | : | Rp. 16.048.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : | 99,99% |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan |

3. Target capaian kegiatan : 52 orang
4. Realisasi capaian kegiatan : 52 orang
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pembinaan Linmas desa dalam menghadapi musim penghujan dan rawan terjadi bencana alam di wilayah Kecamatan Singorojo telah dilaksanakan yang diikuti 52 linmas desa.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan 2 (dua) sub kegiatan antara lain:

a. **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 11.037.500,-

Realisasi Anggaran : Rp. 8.902.600,-

Realisasi Anggaran (%) : 80,66%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Target capaian kegiatan : 13 dokumen
4. Realisasi capaian : 13 dokumen kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Pendampingan Penyusunan Perdes dan Perkades sudah dilaksanakan dan 13 desa sudah menyusun Perdes dan Perkades

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 56.430.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 56.151.300,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,51%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Target capaian kegiatan : 13 dokumen
4. Realisasi capaian : 13 dokumen kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

Monev capaian PBB, administrasi umum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan , pertanggung jawaban keuangan desa sudah dilaksanakan di 13 desa.

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Singorojo Tahun 2023, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.702.837.862,- terserap anggaran sebesar Rp. 2.378.546.553,- atau sebesar 88%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 324.291.309,-, yaitu paling banyak silpa pada anggaran *Gaji dan Tunjangan PNS* karena kekosongan pejabat struktural dan staf dan perjalanan dinas karena adanya refeisiensi terkait dengan tidak diperbolehkannya melaksanakan kegiatan rapat diluar kota.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=7(/)6	9	10	11
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01			KECAMATAN								
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG	Persentase Ketercapaian	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%

				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah								
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	6	6	100	6	6	100
7	01	01	2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3	3	3	3	100	3	3	100

					SKPD (Laporan)									
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	18	18	18	100%	14	14	77,78%	
7	01	01	2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	12	100	12	12	100%	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	18	0	0	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18	0	0	0	0	0	0	0	0

					(Paket)								
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40	70	40	400	100%	40	40	100%
7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang	12	12	12	12	100%	12	12	100%

				Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)								
7	01	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	7	7	100%	0	0	0
7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	9	0	8	8	100%	9	9	100 %

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%

				Daerah	Daerah								
7	01	01	2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	0	8	8	100%	8	8	100%
7	01	01	2.09 0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	4	4	4	4	100%	4	4	100%
7	01	01	2.09 0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi (Unit)	11	10	10	10	100%	11	11	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang	1	1	1	1	100%	1	1	100%

					dilimpahkan(kegiatan)								
7	01	02	2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	30%	30%	30%	15%	50%	30%	30%	100%
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	13	13	13	13	100%	13	13	100%
7	01	03	2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	7	7	100%	7	7	100%

					(Lembaga)								
7	01	03	2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa	7	7	7	7	100%	7	7	100%
7	01	03	2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%

				Ketertiban Umum									
7	01	04	2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan(laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7	01	04	2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan	12	12	12	12	100%	12	12	100%

				dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)								
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan (kali)	12	12	12	12	100%	12	12	100%

7	01	05	2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2.01 0002	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	13	13	13	100%	13	13	100%
7	01	06	2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	13	13	13	13	100%	13	13	100%

					Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)								
7	01	06	2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	13	13	13	100%	13	13	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit

Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
 - 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel TC – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo
Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	91,7	91,9	92,1	92,2	91,67	94,05	92,1	92,1	
2.	Nilai SAKIP	-	-	71,4	71,5	71,8	80	72,90	72,90	71,8	80	

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Singorojo tahun 2024 sampai dengan Semester I untuk nilai SAKIP dari target 71,5 realisasi 72,9 (101,05 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena semua eviden SAKIP sudah dilaksanakan lengkap beserta data dukung dan hasil rekomendasi LHE AKIP sudah ditindak lanjuti dan dilaksanakan. Nilai IKM dari target 91,9 realisasi 94,05 (101,26 %) dengan status capaian sangat tinggi, hal ini karena pelayanan di Kecamatan Singorojo sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang dibuat, pelayanan cepat dan mudah, sehingga masyarakat merasa puas atas produk layanan yang ada di Kecamatan Singorojo.

2.3. Prestasi Yang dicapai pada tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kecamatan Singorojo menjadi Juara II lomba Tarik Tambang Putri dan Juara II Lomba Hadang Putri serta Juara II lomba Hadang Putra dalam rangka Festival Olahraga Tradisional Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke 418.

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Singorojo tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Singorojo, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Singorojo sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD]

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Singorojo adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perasngkat daerah

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Singorojo terdapat banyak permasalahan dan hambatan

2.1. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.

- 2.2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan mengatasi permasalahan-permasalahan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
 - 2.3. Disiplin aparatur yang belum optimal
 - 2.4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
 - 2.5. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.
 - 2.6. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terutama dalam penanganan realisasi dana desa
3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :
- Penurunan angka stunting
 - Pelayanan Publik dan Perijinan
 - Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Singorojo adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Meningkatkan koordinasi dengan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mengatasi permasalahan dan pelaporan
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan
- Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terutama dalam penanganan realisasi dana desa

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

2. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
- Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa
- Mengoptimalkan monitoring evaluasi dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan dana desa
- Evaluasi kegiatan untuk menentukan program tahun berikutnya
- Mengoptimalkan pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah

2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Singorojo pada tahun 2024 telah dilaksanakan 1 urusan 6 program dan 13 kegiatan, Dari 6 program semua program sudah memenuhi target kinerja 5 program dan 1 program belum memenuhi target kinerja yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dikarenakan target terlalu tinggi , aspirasi masyarakat yang disampaikan banyak yang tidak diakomodir oleh Tim RKPD Kabupaten dan juga pembatasan usulan dari masyarakat sehingga program tersebut tidak tercapai sesuai target yang telah ditentukan . Dari 13 kegiatan terdapat 13 kegiatan telah memenuhi target semua. Secara lengkap review terhadap rancangan awal tersaji pada tabel TC.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				2.817.424.771					2.616.750.827	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.631.336.971	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Singorojo	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.416.921.027	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	1.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100%	6.290.000	

	Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja OPD			Daerah		Kinerja OPD			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5.450.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	840.000	
1.2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.227.884.570	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.977.810.626	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Orang yang Menerima	18 Orang	2.227.884.570	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	18 Orang/	1.977.810.626	

	ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	/bulan		ASN		dan Tunjangan ASN	bula n		
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamat an Singorojo	Prosentase terpenuhinya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamat an Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	0	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamat an Singorojo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamat an Singorojo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Pak et	0	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamat an Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor		197.260. 750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamat an Singorojo	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	191.218.7 50	

1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	3.822.00 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	3.822.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	5.397.00 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	25.397.00 0	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	2.800.00 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	5.220.000	

1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	13.017.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.031.750	
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	152.224.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	141.748.000	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	885.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singorojo	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.485.000	
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.600.000	

			Disediakan								
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	885.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	6.885.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	140.412.651	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	140.412.651	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.000.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	41.651.851	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	41.651.851,	

			Listrik yang Disediakan					Disediakan			
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	96.760.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	96.760.800	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	40 unit	63.294.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singorojo	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	40 unit	92.704.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kecamatan Singorojo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	19 unit	36.904.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	19 unit	41.404.000	

	Lapangan		Perizinannya								
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	5.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	9.940.000	
1.6.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	14.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	34.650.000	
1.6.4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	6.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Singorojo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	6.710.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	100%	9.329.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Kecamatan Singorojo	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	9.329.000	

	PUBLIK		kecamatan			PUBLIK					
2.1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	9.329.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 kegiatan	9.329.000	
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		9.329.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	9.329.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	30%	33.904.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Singorojo	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	30%	44.704.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan	13 desa	33.904.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan	13 desa	33.904.000	

			n masyarakat desa					masyarakat desa			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	9.800.000	
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	17.729.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	17.729.000	

3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	6.375.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	6.375.00	
3.2	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Desa yang dibina	13 Desa	0	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Desa yang dibina	13 Desa	10.800.000	
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga kemasyarakatan	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Singorojo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga kemasyarakatan	10.800.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	96.788.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singorojo	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	96.788.800	

4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	96.788.800	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	96.788.800	
4.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	96.788.800	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Singorojo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	96.788.800	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial	100%	8.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kecamatan Singorojo	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	100%	20.950.000	

	PEMERINTAH UMUM		yang di tangani			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	8.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singorojo	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 kegiatan	20.950.000	
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Singorojo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Singorojo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	39 orang	20.950.000	
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen Tugas	4 dokumen	8.600.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	0	0	

	Pimpinan di Kecamatan		Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Pimpinan di Kecamatan		Pimpinan di Kecamatan			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	37.466.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singorojo	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	28.058.000	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 desa	37.466.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	13 desa	28.058.000	
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa	13 dokumen	9.479.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 dokumen	9.479.000	

			dan Peraturan Kepala Desa								
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 dokumen	18.708.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 dokumen	9.300.000	
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	9.279.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singorojo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	9.279.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2025

Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	I	H	I L	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan , Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan provinsi jawa tengah. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;

Arah Kebijakan Kabupaten Kendal

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “ **Kendal Inclusive**” dengan prioritas “**Mewujudkan pembangunan**

daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Arah kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 ditekankan pada:

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya layanan angkutan jalan;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Singorojo Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan Pusat dan Provinsi diuraikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	3.Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;	6.Meningkatnya ketahanan pangan	✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	2.Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	7.Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.	
		8.Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota
		2.Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;	✓ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif		✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Singorojo mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kecamatan Singorojo

bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 5 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SINGOROJO TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	skor	92,1
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	skor	71,8

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan

yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

- Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas

bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/reol time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

- Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam

rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

- Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya

saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

3.4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Singorojo Tahun 2025 ada 6 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Singorojo

KODE				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7				UNSUR KEWILAYAHAN				2.616.750.827,				
7	01			KECAMATAN				2.616.750.827,				3.209.060.000
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	100%	2.416.921.027	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum PAD		100%	2.990.060.000

7	01	01	2.01	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.290.000				2.000.000
7	01	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Singorojo	6 dokumen	5.450.000	PAD		6 dokumen	1.000.000
7	01	10	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Singorojo	3 laporan	840.000	PAD		3 laporan	1.000.000
7	01	01	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.977.810.626				2.500.000.000
7	01	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Kecamatan Singorojo	18 orang/bulan	1.977.810.626	Dana Transfer Umum -		18 orang/bulan	2.500.000.000

					dan Tunjangan ASN				Dana Alokasi Umum			
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				12.560.000
7	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Singorojo	18 paket	0	PAD		18 paket	12.500.000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				191.218.750				215.5000.000
7	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 paket	3.822.000	PAD		12 paket	4.000.000
7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 paket	25.397.000	PAD		12 paket	25.500.000
7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 paket	8.220.000	PAD		12 paket	10.000.000
7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Kecamatan Singorojo	12 paket	15.031.750	PAD		12 paket	14.000.000

					Penggandaan yang Disediakan							
7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singorojo	12 Laporan	141.748.000	PAD		12 Laporan	162.000.000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.485.000				40.000.000
7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	2 unit	1.600.000	PAD		2 unit	30.000.000
7	01	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	3 unit	6.885.000	PAD		3unit	10.000.000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.412.651				142.000.000
7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kecamatan Singorojo	12 laporan	2.000.000	PAD		12 laporan	3.000.000

					Surat Menyurat							
7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 laporan	41.651.851	PAD		12 laporan	42.000.000
7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Singorojo	12 laporan	96.760.800	PAD		12 laporan	97.000.000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.704.000				78.000.000
7	01	01	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Singorojo	19 unit	41.404.000	PAD		19 unit	37.000.00019 unit
7	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan	Jumlah	Kecamatan	8 unit	9.940.000	PAD		8 unit	6.000.000

				Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Singorojo						
7	01	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Singorojo	4 unit	34.650.000	PAD		4 unit	28.000.000
7	01	01	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Singorojo	11 unit	6.710.000	PAD		11 unit	7.000.000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Singorojo	100%	9.329.000	PAD		100%	10.000.000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.329.000				10.000.000
7	01	02	2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Singorojo	1 laporan	9.329.000	PAD		1 laporan	10.000.000

7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Kecamatan Singorojo	30%	44.704.000	PAD		30%	47.000.000
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				33.904.000				37.000.000
7	01	03	2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Singorojo	7 lembaga kemasyarakatan	9.800.000	PAD		7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000
7	01	03	2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singorojo	12 laporan	17.729.000	PAD		12 laporan	7.000.000
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Desa yang dibina	Kecamatan Singorojo	13 desa	10.800.000	PAD		13 desa	10.000.000

				Kecamatan								
7	01	03	2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Singorojo	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.800.000				
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Singorojo	100%	96.788.800	PAD		100%	97.000.000
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				96.788.800				97.000.000
7	01	04	2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Kecamatan Singorojo	12 laporan	96.788.800	PAD		12 laporan	97.000.000

					Indonesia							
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Kecamatan Singorojo	90%	20.950.000	PAD		100%	22.000.000
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				20.950.000	PAD			22.000.000
7	01	05	2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Singorojo	39 orang	20.950.000	PAD			22.000.000
7	01	05	2.010008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Singorojo	4 dokumen	0	PAD		4 dokumen	9.000.000
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Singorojo	90%	28.058.000	PAD		90%	43.000.000

7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.058.000				43.000.000
7	01	06	2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Singorojo	13 dokumen	9.479.000	PAD		13 dokumen	13.000.000
7	01	06	2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Singorojo	13 dokumen	9.300.000	PAD		13 dokumen	20.000.000
7	01	06	2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singorojo	13 dokumen	9.279.000	PAD		13 dokumen	10.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Singorojo merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum: pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum , pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum , Pengoordinasian penyelenggraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan , pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan , pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah Pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singorojo diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singorojo merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo Tahun 2025 adalah 6 program dengan 13 kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singorojo sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Singorojo dan melingkupi semua desa 13 (tiga belas) desa.

- Program Prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

dengan anggaran Rp. 44.704.000,- terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan sub kegiatan :

- 1.1. *Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa* yang aktivitasnya berupa pelaksanaan Musrenbangcam sebagai sarana untuk menyampaikan usulan/parisipasi masyarakat masyarakat dalam pembangunan dari tingkat desa untuk disampaikan di tingkat Kecamatan yang nantinya akan disampaikan ke tingkat Kabupaten
- 1.2. *Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan* yang aktivitasnya dengan melaksanakan pameran produk UMKM dari wilayah kecamatan Singorojo di Pekan Raya Kendal serta melaksanakan pelatihan peningkatan hasil produk UMKM bagi pelaku UMKM Kecamatan Singorojo.
- 1.3. *Peningkatann Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*, aktifitasnya adalah kegiatan Raker PKK yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan pleno PKK tingkat Kecamatan Singorojo yang dilaksanakan setiap bulan, untuk meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan khususnya di wilayah kecamatan Singorojo.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :

- 2.1. *Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, aktifitasnya Optimalisasi peran dan fungsi RT/RW dalam pembangunan desa, upaya sinkronisasi dan koordinasi program-program yang ada di desa dengan pemerintah desa.*

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 28.058.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

Kegiatan

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan :

- 1.1. *Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan aktifitas melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa dan Penyusunan Peraturan Kepala Desa untuk 13 desa diwilayah Kecamatan Singorojo agar Perdes dan Perkades yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
- 1.2. *Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, melakukan pendampingan dan monev agar tercipta tertib administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan serta administrasi lainnya*
- 1.3. *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan , mulai dari perencanaan, penggunaan dan pertanggung jawaban (SPJ) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 9.329.000,- terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan Kepada Camat, sub kegiatan :

- 1.1. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan,*

Angka Pernikahan Dini Kecamatan Singorojo tahun 2024 menjadi rangking 3 tertinggi di Kabupaten Kendal , atas dasar tingginya angka pernikahan dini tersebut akan dilaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dengan sasaran Ketua Tim Penggerak PKK Desa ,TP PKK Kecamatan dan kader PKK desa, agar bisa menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya melalui pertemuan PKK RT/RW/Desa.

- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan anggaran Rp. 20.950.000 dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Kegiatan :

1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sub kegiatan :

- 1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan mengadakan Bimtek kepada linmas yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan linmas desa dalam melindungi masyarakat dari bencana alam maupun gangguan ketertiban umum.

- 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan anggaran Rp. 96.788.800 dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan.

Kegiatan :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sub Kegiatan :
- 1.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pengamanan kantor kecamatan dan lingkungannya dibutuhkan tenaga Linmas sejumlah 3 (tiga) orang yang bukan dari ASN, sehingga perlu honor Linmas 12 bulan .

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 2.416.921.027 yang terdiri dari 7 Kegiatan 18 Sub Kegiatan, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan diperlukan sarana dan prasarana baik itu gaji, tunjangan, gedung, peralatan komputer, ATK, peralatan listrik, ketersediaan listrik, air, telepon dan wifi, pemeliharaan sepeda motor maupun mobil dinas ,dan lain-lain maupun kenyamanan ruang untuk pelayanan dan melaksanakan tugas.

Kegiatan :

- 1.1 Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Untuk lebih jelas nya kami sampaikan hasil cetakan input dari SIPD RI sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan Singorojo berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran untuk mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD 2021-2026.

. Penyusunan Rencana Kinerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025.

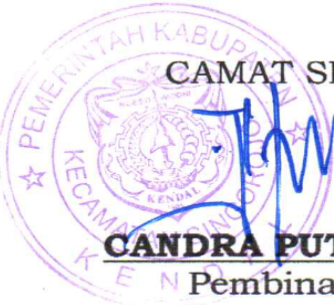
Renja 2025 Kecamatan Singorojo ini diharapkan selaras serta dapat dipergunakan sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2025, sehingga rencana tindak lanjut dapat lebih terarah dan terukur menyesuaikan ketersediaan anggaran serta kaidah pelaksanaan. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan Singorojo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai diselaraskan dengan tugas dan fungsinya.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan tujuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kendal

Akhir kata, semoga dokumen Renja 2025 Kecamatan Singorojo ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Singorojo sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Kendal, Agustus 2024


CAMAT SINGOROJO

CANDRA PUTRA, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760622 199703 1 004